



MENUJU BANGSA KOMPETITIF MELALUI PENDIDIKAN

Disampaikan dalam acara
Sidang Universitas Airlangga
pada tanggal 10 November 2011
di Ruang Garuda Mukti Kantor Manajemen Universitas Airlangga
Kampus C Mulyorejo
Surabaya

Kacung Marijan

UNIVERSITAS AIRLANGGA
2011

KFB
KK.
PG.09116.
Mar
M

MENUJU BANGSA KOMPETITIF MELALUI PENDIDIKAN

Yang terhormat,

Rektor dan Pimpinan di Lingkungan Universitas Airlangga,
Pimpinan dan anggota Senat Akademik,
Para Guru Besar dan seluruh keluarga besar Universitas Airlangga
Seluruh hadirin dalam acara yang sangat terhormat ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Seorang ahli manajemen dari Universitas Harvard, Michael Porter, pernah menulis buku yang cukup menarik, *the Competitive Advantages of Nations* (1990), suatu buku yang berisikan pengembangan dari tulisan-tulisannya sebelumnya, tentang pentingnya keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) bagi suatu bangsa (makro) dan perusahaan (mikro). Gagasan utama dari buku ini adalah adanya perubahan pendekatan di dalam mendorong kemajuan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi, dari sebelumnya berbasis keunggulan komparatif (*comparative advantage*) ke yang berbasis keunggulan kompetitif. Uraianya sendiri pada dasarnya merupakan jawaban atas pertanyaan, 'why do some social groups, economic institutions, and nations advance and prosper?'. Pertanyaan serupa, menurut Robert Grant (1991) sebenarnya sudah dikemukakan dan dibahas oleh para peletak dasar ilmu ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo. Tetapi, jawaban dari pertanyaan itu berbeda. Para ekonom sebelumnya lebih menekankan pendekatan keunggulan komparatif, sementara Porter menawarkan pendekatan keunggulan kompetitif.



Setelah mempelajari perekonomian dan perusahaan di berbagai negara, Porter mengatakan bahwa suatu bangsa atau perusahaan akan mengalami kemajuan lebih dari yang lain manakala bangsa atau perusahaan itu memiliki keunggulan kompetitif. Sebaliknya, manakala keunggulan kompetitifnya rendah, akan mengalami kesulitan berkembang.

Hadirin yang berbahagia,

Di antara realitas yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masih belum tingginya daya saing bangsa. Paling tidak hal ini tercermin dari laporan yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF), tentang The Global Competitiveness Report 2011–2012. Dalam laporan ini terlihat bahwa posisi daya saing Indonesia masih belum terlalu memuaskan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti yang terlihat di dalam table 1, di antara sejumlah negara Asean, daya saing Indonesia pada 2011 masih menduduki urutan ke-4, di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Bahkan, kalau dibandingkan dengan 2010, peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan, dari 44 ke 46, dari keseluruhan Negara yang dilaporkan oleh WEF. Padahal daya saing bangsa memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan bangsa yang memilikinya. Pertanyaannya kemudian, apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat tingkat daya saing bangsa Indonesia?

Tabel 1. Peringkat Daya Saing Beberapa Negara ASEAN Tahun 2011

Negara	Peringkat 2011	Skor	Peringkat 2010	Perubahan
Singapura	2	5.63	3	1
Malsysia	21	5.08	26	5
Thailand	39	4.52	38	-1
Indonesia	46	4.38	44	-2
Vietnam	69	4.24	59	-6
Philipina	75	4.08	85	10

Sumber: WEF (2011)

Pertanyaan semacam itu perlu memperoleh jawaban yang lebih serius ketika dikaitkan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan yang hendak diraih di masa-masa yang akan datang. Seperti yang terlihat di dalam grafik 1, Indonesia mengalami pertumbuhan GDP yang cukup berarti tiga dekade belakangan, dari US\$ 60,143.191 pada 1980 menjadi US\$ 6,422,918.230. Lompatan pertumbuhan terjadi setelah 2000, ketika secara perlahan Indonesia bisa mengatasi krisis ekonomi pada 1997/98. Pertumbuhan ini pula yang telah membawa Indonesia masuk ke dalam katagori 20 negara yang memiliki ukuran ekonomi besar (G-20). Sekiranya, pertumbuhan ekonomi terus berlanjut secara berarti, tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan menjadi bagian dari 10 negara yang memiliki ukuran ekonomi besar dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Pada 2045, GDP Indonesia diperkirakan pada kisaran US\$ 15–17.5 triliun, suatu angka yang cukup spektakuler kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi saat ini.

Di samping didasarkan pada adanya asumsi pertumbuhan ekonomi terus-menerus secara konsisten dalam kisaran angka yang cukup tinggi, kisaran GDP sebesar itu juga didasarkan pada perkiraan struktur penduduk yang lebih menguntungkan. Pada 2045, penduduk yang berusia antara 15–64 tahun diperkirakan pada kisaran 70%. Ini berarti, penduduk usia produktif jauh melebihi katagori penduduk lainnya. Struktur penduduk seperti ini akan berbeda dengan struktur penduduk di negara-negara maju saat ini, yang akan banyak didominasi oleh penduduk berusia tua. Struktur penduduk semacam itu memberi peluang tentang kemungkinan penduduk Indonesia lebih kompetitif kalau dibandingkan dengan banyak negara lainnya.



Faktor kualitas penduduk, dengan demikian, memegang peran yang sangat penting. Manakala 70% penduduk usia produktif itu memiliki kualitas rendah, keadaannya justru akan berbalik. Bukan bonus demografis yang akan kita miliki, melainkan malapetaka demografis, karena jumlah penduduk yang besar itu akan berubah menjadi beban. Dalam situasi adanya jumlah penduduk yang besar tetapi tidak berkualitas, akan melahirkan serentetan permasalahan yang tidak mudah diatasi, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Untuk mencegah kemungkinan seperti ini terjadi, Indonesia menghadapi tantangan adanya ledakan jumlah penduduk yang berlebihan, dan meningkatkan kualitasnya penduduknya. Pada kesempatan ini, saya lebih fokus memperbincangkan bagaimana meningkatkan kualitas penduduk sehingga Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif melalui pendidikan.

Hadirin yang saya hormati,

Kembali pada gagasan Michael Porter tentang keunggulan kompetitif. Dalam menjawab pertanyaan, 'why do some social groups, economic institutions, and nations advance and prosper?', David Ricardo terkenal dengan doktrin keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Menurut doktrin ini, negara-negara di dunia ini pada dasarnya tidak memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang sama (Samil dan Jacobs, 1995). Masing-masing negara, dengan demikian, telah mengembangkan ketrampilan yang berbeda-beda untuk mengolah sumber-sumber alam yang berbeda itu. Konsekuensinya, ada sejumlah negara yang bisa menghasilkan barang-barang yang lebih murah kalau dibandingkan dengan yang lain. Karena itu, bagi negara-negara tertentu, lebih baik mengimpor barang-barang yang lebih murah itu daripada harus memproduksinya sendiri. Teori perdagangan internasional yang berangkat dari doktrin ini kemudian adalah bahwa masing-masing negara hendaknya lebih menekankan pada produksi dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif kalau dibandingkan dengan negara-negara lain.

Doktrin semacam itulah yang melahirkan teori pembagian kerja secara internasional (*internationally division of labour*), di mana masing-masing negara memiliki 'spesialisasi' di dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tertentu. Bahkan, proses produksi itu pun kemudian tidak lagi didasarkan pada sumber-sumber alam yang dimiliki oleh suatu negara. Yang terjadi kemudian adalah adanya negara-negara yang lebih banyak berperan sebagai pengekspor barang-barang mentah, dan ada negara-negara yang lebih banyak sebagai pengekspor barang-barang jadi.

Guna menopang doktrin keunggulan komparatif semacam itu, negara dianggap memiliki peran yang strategis, yaitu membuat kebijakan-kebijakan makro tertentu. Di antaranya adalah strategi memperlemah nilai mata uang (*devaluasi*), membuat kebijakan industri tertentu, khususnya berupa proteksi industri nasional dari 'serangan' industri dari negara-negara lain. Tujuannya, penerimaan atau hasil yang dimiliki akan jauh lebih besar daripada yang harus dikeluarkan.

Teori pembagian kerja secara internasional semacam inilah yang pada 1970-an banyak dikritik oleh para ilmuwan sosial yang di kemudian hari dikenal sebagai pencetus teori ketergantungan. Bahwa pembagian kerja semacam itu pada kenyataannya lebih banyak menguntungkan negara-negara industri karena terdapat nilai yang sangat jauh (*trade off*) antara barang-barang mentah dengan barang-barang olahan. Konsekuensinya, negara-negara pengekspor barang-barang mentah dalam kondisi terbelakang dan penuh kemiskinan. Dengan kata lain, teori pembagian kerja secara internasional itu dipandang telah melahirkan ketidakadilan di dalam hubungan perdagangan antara negara satu dengan lainnya. Relasi antara negara yang telah maju dengan negara yang terbelakang lebih didasari oleh pola dependensi, bukan interdependensi sebagaimana asumsi awal para pencetus pendekatan keunggulan komparatif.

Michael Porter mengkritik bukan dari sisi ketidakadilan, tetapi berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas implementasi pendekatan. Pendekatan keunggulan kompetitif lebih member penekanan pada aspek keahlian di dalam pengelolaan dan implementasi proaktif di dalam rencana strategis yang canggih. Karena itulah, menurut Coscun Samli dan Laurence Jacob (1995: 24), pendekatan ini lebih menekankan pada strategi makro suatu negara. Strategi itu mencakup peran negara di dalam membantu entitas korporasi melalui dukungan terhadap penelitian dan pengembangan, investasi terhadap sumber daya manusia, dan renovasi dan pembangunan infrastruktur.

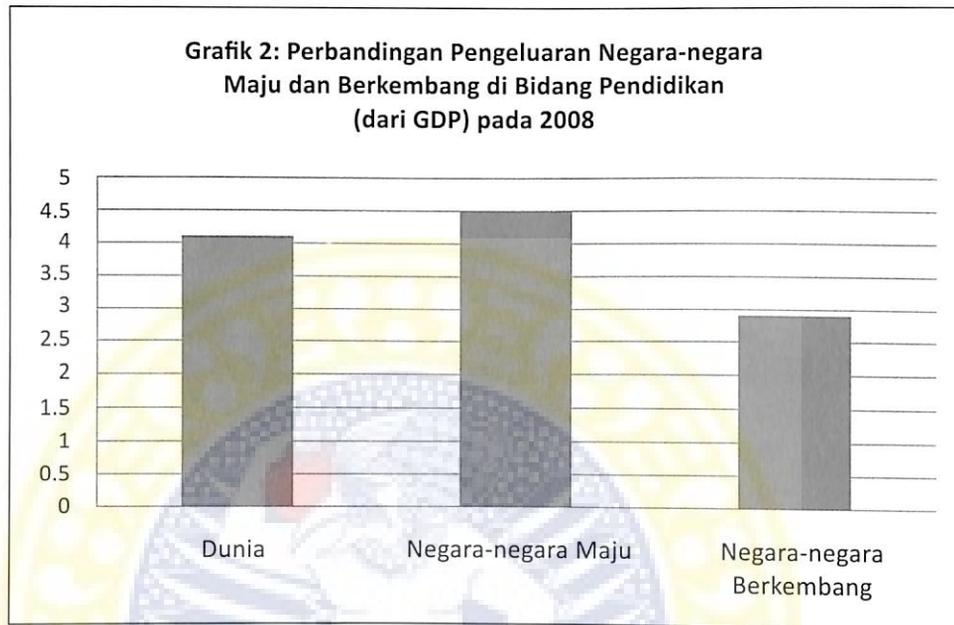
Perbedaan pokok pendekatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, dengan demikian, terletak pada titik tekannya. Pendekatan keunggulan komparatif lebih menekankan pada prinsip efisiensi faktor-faktor produksi tertentu seperti tanah, tenaga kerja dan modal lainnya. Sementara itu, pendekatan keunggulan kompetitif lebih menekankan pada efektivitas di sisi pengelolaan. Dengan kata lain, pendekatan keunggulan komparatif lebih menekankan pada upaya untuk meminimalisasi biaya dan harga, sementara itu pendekatan keunggulan kompetitif lebih menekankan pada perbaikan pengelolaan.



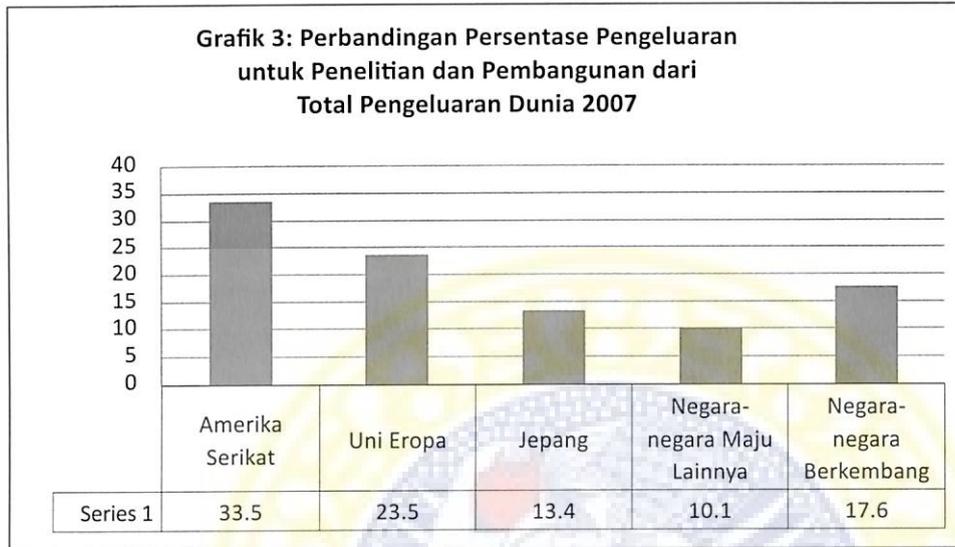
Dalam konteks semacam itu, adanya perbaikan kualitas SDM yang baik, merupakan salah satu kondisi kunci bagi pendekatan keunggulan kompetitif. Adanya Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh suatu bangsa merupakan sumber pokok bagi upaya mewujudkan bangsa yang kompetitif. Pandangan semacam ini sejalan dengan teori pertumbuhan baru (*new growth theory*) yang menekankan pentingnya pendidikan di dalam pembentukan modal manusia dan produksi ilmu pengetahuan baru.

Menyadari pentingnya pendidikan sebagai salah satu sumber pokok bagi bangunan bangsa yang kompetitif, banyak negara telah melakukan investasi besar-besaran di dunia pendidikan. Tragisnya, investasi demikian banyak dilakukan oleh negara-negara maju daripada oleh negara-negara sedang berkembang. Seperti terlihat di dalam grafik 2, pada 2008, negara-negara maju mengalokasikan 4,5% dari GDP-nya di sector pendidikan. Pada tahun yang sama, Negara-negara sedang berkembang hanya mengalokasikan 2,9%. Realitas demikian lebih menggenaskan lagi kalau kita mencermati besaran total GDP. GDP Negara-negara maju jelas jauh lebih besar dari GDP negara-negara sedang berkembang. Karena itu, kalau prosentase itu diwujudkan ke dalam bentuk riel pengeluaran, jumlah anggaran yang dikucurkan oleh negara-negara maju di sektor pendidikan akan jauh lebih besar.





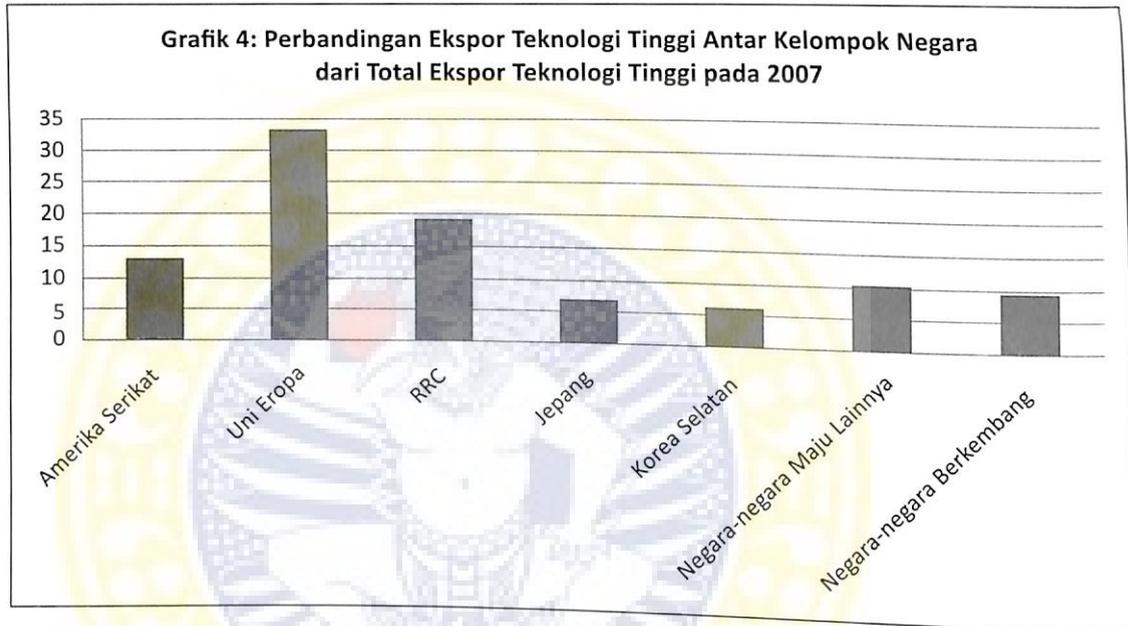
Kondisi serupa untuk pengeluaran di bidang penelitian dan pengembangan. Seperti terlihat di dalam grafik 3, dari total anggaran untuk penelitian dan pengembangan (R & D) pada 2007, mayoritas dikeluarkan oleh negara-negara maju. Amerika Serikat merupakan negara yang mengalokasikan anggaran paling besar, yaitu 33,5% dari total pengeluaran dunia, disusul oleh negara-negara yang tergabung di dalam uni Eropa sebesar 23,5%. Sementara itu, kontribusi negara-negara sedang berkembang di dalam penelitian dan pengembangan hanya 17,6%.



Memang, pengeluaran di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan teknologi yang dihasilkan, misalnya. Seperti terlihat di dalam grafik 4, ekspor barang-barang berteknologi tinggi didominasi oleh negara-negara maju, khususnya adalah dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di luar itu, RRC, Jepang dan Korea Selatan memiliki peran yang cukup penting. Data ini mengkonfirmasi bahwa negara yang melakukan investasi di dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan lebih besar tidak otomatis berperan sebagai negara pengekspor barang-barang berteknologi tinggi. Tetapi, data itu juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa mengingat investasi negara-negara berkembang di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan itu relative rendah, total ekspor barang-barang berteknologi tinggi dari Negara-negara demikian juga rendah.

Kalau di dalam grafik itu terlihat adanya RRC dan Korea Selatan yang tampil sebagai negara-negara yang unjuk gigi sebagai pengekspor barang-barang berteknologi tinggi, tidak bisa dilepaskan dari upaya serius dua negara itu di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan. Hal ini tidak hanya terlihat

dari alokasi anggaran yang cukup besar di sektor ini. Kalau kita baca laporan tentang universitas-universitas terkemuka dari negara-negara Asia, tidak sedikit yang berasal dari RRC dan Korea Selatan.



Para hadirin yang berbahagia,

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sejak awal Indonesia sudah menyadari pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM. Kesadaran demikian bukan hanya dimiliki oleh negara, melainkan juga oleh kelompok-kelompok masyarakat dan para pelaku usaha. Hal ini terlihat dari para pengelola lembaga-lembaga pendidikan. Selain oleh negara, lembaga-lembaga pendidikan dikelola oleh organisasi-organisasi masyarakat dan 'korporasi'. Hal ini bisa dipahami, mengingat kemampuan negara di dalam menyelenggarakan pendidikan masih terbatas.

Pascareformasi memang telah mengharuskan negara memiliki peran yang lebih besar di bidang pendidikan. Hal ini tercermin dari perubahan konstitusi yang mewajibkan negara mengalokasikan 20%. Mulai saat itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, menaruh perhatian lebih serius di bidang pendidikan. Untuk itu, seperti terlihat di dalam tabel 2, anggaran untuk pendidikan terus mengalami kenaikan yang berarti. Peningkatan ini tidak hanya dari pemerintah pusat, melainkan juga dari pemerintah daerah. Anggaran itu, khususnya diarahkan untuk memperbesar akses bagi warga di dalam pendidikan dasar dan menengah, melalui penambahan jumlah sekolah dan pemberian BOS kepada peserta didik. Sementara itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas masih terbatas. Di antara langkah untuk meningkatkan kualitas adalah untuk memperketat persyaratan menjadi pendidik.

Tabel 2. Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2005–2010

Tahun Anggaran	Besar Anggaran	%
2005	33,40 triliun	8,1
2006	44,11 triliun	10,1
2007	53,07 triliun	10,5
2008	158,52 triliun	18,5
2009	207,41 triliun	20,0
2010	209,54 triliun	20,0

Meskipun demikian, mengingat jumlah penduduk Indonesia cukup besar dan permasalahan yang harus dibenahi juga cukup banyak, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa hanya diserahkan kepada negara. Untuk itu, adanya pendekatan kemitraan antara pemerintah, pasar, dan komunitas (public-private-community partnership) menjadi sangat penting. Pemerintah, tidak hanya berperan sebagai regulator, melainkan juga sebagai aktor penting di bidang pendidikan. Kontribusi swasta dan kelompok-kelompok masyarakat juga sangat penting.

Selain itu, menjadikan pendidikan sebagai fondasi bagi bangunan Indonesia yang kompetitif juga membutuhkan disain kebijakan pendidikan yang berkualitas. Paling tidak, ada dua pilar utama dan satu pilar pendasar yang dibutuhkan. Pertama, bangsa yang kompetitif membutuhkan adanya lembaga yang menaruh perhatian serius pada penelitian dan pengembangan. Di sini, universitas dan pusat-pusat penelitian menjadi sangat penting. Hanya saja, selama ini universitas dan pusat-pusat penelitian menghadapi tiga kendala yang cukup serius. Kendala pertama adalah masih minimnya peneliti yang berkualitas. Kedua, alokasi anggaran penelitian dan pengembangan masih terbatas. Kendala yang terakhir adalah penelitian-penelitian itu terserak-serak atau berjalan sendiri-sendiri.

Ke depan, universitas selain diarahkan untuk memproduksi pengetahuan dan mencetak sarjana yang handal, juga dituntut untuk mengembangkan diri sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Untuk mengatasi kendala pendanaan, universitas tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah dan sumbangan dari peserta didik. Universitas dituntut memiliki kemampuan menggalang kemitraan dengan korporasi dan kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu, untuk efisiensi dan efektivitas, juga dibutuhkan adanya kemitraan antar universitas di dalam pengerjaan proyek-proyek penelitian.

Pilar kedua adalah adanya lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri pada aspek keterampilan (*skills*). Pilar ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga kerja yang handal. Pilar kedua ini bisa diupayakan melalui pengembangan pendidikan vokasi, baik di tingkat lembaga pendidikan tinggi seperti politeknik maupun di tingkat pendidikan menengah seperti SMK.

Dua pilar lembaga pendidikan itu seharusnya berjalan seiring. Bagaimanapun juga, berkembang pesatnya industri manufaktur dan jasa, dan tentu saja sektor pertanian, tidak bisa dilepaskan dari adanya lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan yang handal. Kalau tidak, Indonesia hanya akan menjadi bangsa konsumen dari produk-produk barang dan jasa dari negara-negara lain. Di pihak lain, industri manufaktur dan jasa, serta sektor pertanian, membutuhkan orang-orang yang terampil.



Tetapi, dua pilar itu menjadi kurang memiliki ruh tanpa adanya pilar ketiga, yaitu adanya karakter bangsa yang handal. Karakter bangsa ini dibutuhkan untuk merekatkan bangsa, untuk menciptakan kestabilan. Selain itu, karakter bangsa juga berfungsi sebagai spirit berkompetisi secara sehat, baik di lingkungan domestik maupun internasional.

Untuk itu, masuknya kembali kebudayaan sebagai bagian dari kementerian pendidikan, memiliki makna yang cukup berarti. Kebudayaan, bagaimanapun juga bukan sekadar ciptaan manusia untuk menjadi tontonan. Kebudayaan merupakan ciptaan manusia untuk menjadi tuntunan, pedoman berperilaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Antropolog Clifford Geertz, kebudayaan merupakan *pattern for behavior*, pedoman berperilaku. Termasuk di dalamnya adalah perilaku kompetitif.

Hadirin yang saya hormati,

Universitas Airlangga merupakan salah satu lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia. Universitas ini bisa sekaligus mengembangkan tiga pilar yang saya sebut itu. Universitas Airlangga berperan sebagai lembaga yang menjadi pusat penelitian dan pengembangan (sebagai produsen knowledge), pencetak peserta didik yang terampil, dan sekaligus sebagai peletak dasar perilaku kompetitif yang berbudi luhur sebagaimana semboyan *excellent with morality*. Itu merupakan sebuah pilihan. Minimal, Universitas Airlangga bisa berperan sebagai *teaching and research university* yang memiliki basis spirit yang handal.

Apapun pilihannya, tantangan yang dihadapi oleh Universitas Airlangga sangat besar. Tantangan globalnya adalah bagaimana Universitas Airlangga memiliki kontribusi yang lebih besar untuk membawa Indonesia sebagai bangsa yang kompetitif.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

SEKILAS RIWAYAT HIDUP

Kacung Marijan adalah Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lahir di Lamongan. Menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah di Lamongan. Pendidikan strata satu di FISIP Universitas Airlangga, strata dua di the Flinders University of South Australia, dan strata tiga di the Australian National University. Pernah memiliki pengalaman sebagai guru SMA, dan sejak 1986 menjadi kolumnis di sejumlah media. Pada 2006 diangkat sebagai Guru Besar bidang Perbandingan Politik di FISIP Universitas Airlangga.

